

**ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI (JASA)
PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR)**

SKRIPSI



Oleh :
NUR ANNISA UMAR
NIM 105710218615

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI (JASA)
PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR)**

SKRIPSI



Oleh :
NUR ANNISA UMAR
NIM 105710218615

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan karunianya yang telah diberikan untuk menikmati indahny dunia. Kepada Bapak Umar Baco, SE., dan Mama Rahmatiah Sayuti SH.,MH, yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tak terhingga.

MOTTO HIDUP

“Banyak orang-orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya dikarenakan mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

“pahamilah apa yang anda rasakan dalam hidup dengan berpikir ke belakang. Akan tetapi jadikan itu sebagai kekuatan untuk berperang dengan masa depan”



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI (JASA) PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Makassar Tahun 2017)"

Nama Mahasiswa : Nur Annisa Umar

No. Stambuk/NIM : 105710218615

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diuji dan diseminarkan pada tanggal 31 Agustus 2019

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Rusydi, M.Si
NIDN : 0031126074

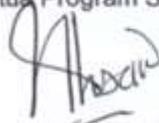

Warda, SE., ME
NIDN : 0927039003

Mengetahui

Ketua Program Studi



Ismail Rusulung, SE., MM
NBM : 903.078


Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM : 710 56



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **NUR ANNISA UMAR, NIM 105710218615**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0005/SK-Y/60201/091004/2019 tanggal 31 Agustus 2019, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Universitas Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muhammad Rusydi, M.Si
2. Dr. H Muh. Ikram Idrus, M.Si
3. Asriati, SE., M.Si
4. Dr. Hj. Amiati, SE., M.Pd

Ismail
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jln. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972



SURAT PERNYATAAN

Saya yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Annisa Umar

Stambuk : 105710 218615

Program studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan Judul : "Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi (Jasa) Pasar
Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus
Pada Pemerintah Kota Makassar)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri, Bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pertanyaan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019



Membuat Pernyataan

Annisa Umar

Diketahui oleh:



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Raswandi, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Program Studi EP

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM : 710 561

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pemungutan retribusi (Jasa) pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Makassar Tahun 2017)”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Umar Baco, SE. Dan Ibu Rahmatiah Sayuti, SH., MH yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberi semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari pihak-pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah membukajalandanmengangkatkesulitan-kesulitanku. Terimakasihkarenasudah memberikan kesehatan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua orang tuaku Bapak Umar Baco, SE dan Ibu Rahmatiah Sayuti, SH.,MH,terimakasihkarenatelahmendidikkudenganpenuhkesederhanaan, menanamkannilai-nilailuhurkehidupan, senantiasaingatkankuuntukmenjadi orang yang selaludapatmenebarmanfaatbagisekitar.
3. Untuk Hj. Marwiah Dg. Bau Terimakasih menjadi Orang Tua yang turut andil membesarkan dan mendidik saya. Terimakasihkarenatelahmembentukseorang NUNU menjadi orang yang dicintaibanyak orang.
4. Untuk saudaraku (Rum, Sul, Ibnu, Dede) terima kasih telah membantuku dan selalu mengerti keegoisanku. Terkhusus adik-adikku kalian juga harus merasakan enaknya bangku perkuliahan dan nikmatnya proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H Abd Rahman Rahim, SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Ismail Rasullong, SE.,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si, selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Bapak Asdar, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar

9. Bapak Dr. Muhammad Rusydi, M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
10. Ibu Warda, SE., ME, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam proses penyusunan skripsi hingga ujian akhir.
11. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dan banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
12. Segenap staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
13. Untuk PD. Pasar Makassar raya Kota Makassar, terima kasih telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
14. Untuk Dody Ariatmo, terima kasih selama ini sudah menemani NUNU mulai dari mendaftar kuliah sampai penyusunan Skripsi ini selesai, terima kasih atas doa dan supportnya
15. Untuk sahabat-sahabatku (Winda, Dila, dan Sidar, Ani, Devi, Imal dan A.irwan) terima kasih sudah mau mengerti dan mendengarkan keluh dan kesah selama ini.
16. Rekan-rekan Mahasiswa kelas EP15B yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis
17. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis mampun merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua

pihakutamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater kampus Biru Universitas Muhammadiyah.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb



ABSTRAK

NUR ANNISA UMAR, Tahun 2019 Analisis Efektifitas Pemungutan retribusi (Jasa) Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar 2017), Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Pembimbing I Muhammad Rusydi dan Pembimbing II Warda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi (jasa) pasar di Kota Makassar, Penelitian ini berlokasi di Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar dengan Unit Analisis yaitu organisasi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar yang berwenang melaksanakan pemungutan retribusi (jasa) pasar. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan pemungutan retribusi (Jasa) pasar selama 4 tahun (2014-2017) rata-rata mencapai 95,72 % di Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas dikatakan belum tercapai, meskipun lebih dari 90% realisasinya.

Kata Kunci : *Retribusi (jasa) Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

ABSTRACT

NUR ANNISA UMAR, 2019 Analysis of the Effectiveness of Market Retribution (Service) on Regional Original Revenue (PAD) (Case Study of Makassar City Government 2017), Thesis of Economic Development Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar, Supervised by Advisor I Muhammad Rusydi and Warda II Counselor

This study aims to determine the implementation of market levies collection (services) in Makassar City, this research is located in Makassar Raya Makassar Regional Market Company with the Unit of Analysis, namely Makassar Raya Makassar Regional Market Enterprise organization that is authorized to carry out market levies (service) collection. This research is a qualitative descriptive study. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of the collection of user fees (services) for 4 years (2014-2017) averaged 95.72% in Makassar City. This shows that the effectiveness is said to have not been achieved, even though more than 90% of its realization.

Keywords: *Market Retribution (services), Regional Original Income (PAD)*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	8
1. Penerimaan Daerah	8
a. Pendapatn Asli Daerah	8
b. Dana Perimbangan	13
c. Pinjaman Daerah	14
d. Lain-lain Penerimaan Daerah	15
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
a. Pajak Daerah	15
b. Unsur Pajak	15
c. Fungsi Pajak	16
3. Retribusi Pasar	16
a. Definisi Retribusi (Jasa) Pasar	16
b. Jenis dan Kriteria Pasar	18
c. Ciri-ciri Retribusi Pasar	20
4. Landasan Hukum	21
5. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD	23
6. Efektivitas	23
a. Pengertian Efektivitas	23
b. Efektivitas Pemungutan Retribusi (Jasa) Pasar	23
B. TINJAUAN EMPIRIS	24
C. KERANGKA KONSEP	26

D. HIPOTESIS	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sumber Data	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Definisi Operasional variabel	29
D. Populasi dan Sampel	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR	31
1. Keadaan Geografis	31
2. Kependudukan	32
3. Pendidikan	35
B. PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR	38
1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi (Jasa)Pasar Kota Makassar	38
2. Penentuan Target Retribusi/jasa) Pasar Kota Makassar...	39
3. Proses Pemungutan Retribusi (Jasa) Pasar Kota Makassar	40
4. Skema (Alur) Pemungutan Retribusi (jasa) Pasar	40
5. Upaya Peningkatan PAD di PD. Pasar Kota Makassar	41
C. ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR KOTA MAKASSAR	43
V. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	47
B. SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tinjauan Empiris	25
Tabel 3.1	Efektivitas Pemungutan Retribusi (Jasa) Pasar Di Kota Makassar Tahun 2017	30
Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar	32
Tabel 4.2	Jumlah penduduk Kota Makassar di Rinci Berdasarkan Kecamatan	33
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Dirinci Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Makassar	34
Tabel 4.4	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar(SD) Menurut Kecamatan di Kota Makassar	35
Tabel 4.5	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kota Makassar	36
Tabel 4.6	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Akhir Menurut Kecamatan di Kota Makassar	37
Tabel 4.7	Perincian Penerimaan target dan realisasi Retribusi (jasa) Pasar Kota Makassar dari Tahun 2014-2017	38
Tabel 4.8	Pemungutan Retribusi (Jasa) pasar di Kota Makassar Tahun 2014-2017	44
Tabel 4.9	Efektivitas Pemungutan Retribusi (jasa) Pasar Di Kota Makassar	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	26
Gambar 4.1	Skema (Alur) Pemungutan Retribusi (jasa) Pasar	40



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul
Lampiran 1	Surat izin Penelitian PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar
Lampiran 2	Surat izin Penelitian PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk Tembusan Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
Lampiran 3	Surat izin Penelitian PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk mahasiswa yang bersangkutan
Lampiran 4	Bukti setoran PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain itu berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 menyatakan pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Sementara sumber keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, umumnya sudah ditentukan untuk pembiayaan tertentu yang sifatnya mengikat. Pemerintah daerah berusaha bagaimana menggali PAD semaksimal mungkin agar bisa

memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya demi perkembangan dan pembangunan pada suatu daerah.

Kemasan kegiatan pemerintah dan program-program pembangunan dilakukan melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Kewenangan yang besar ini tentunya memiliki implikasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan serangkaian persiapan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, keuangan dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah tentunya harus siap dengan segala konsekuensinya untuk memikul tugas dan tanggungjawab mengatur seperangkat sumber-sumber dana dan daya dalam meningkatkan pelayanan kepada publiknya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya di dalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui UU No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat lebih ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada pemerintah kabupaten dan kota, retribusi (Jasa) pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar itu sendiri. Menurut Rahardjo Adisasmita (2011) dalam bukunya yang berjudul “”pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah” menyebutkan bahwa efisiensi berasal dari kata efisien yang merupakan pencapaian target dengan menggunakan input (biaya) yang sama untuk menghasilkan Output (hasil) yang lebih besar dan sedangkan efektivitas yang berasal dari kata efektif adalah kemampuan menghasilkan output/ hasil yang diinginkan ketika sesuatu yang dipandang efektif, maka hal tersebut dipandang atau dianggap akan memiliki hasil yang diharapkan.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota yang mampu menggali potensi daerahnya sendiri. Salah satu potensi yang dimiliki adalah pendapatan retribusi (Jasa) pasar. Berikut data target dan realisasi retribusi pasar Kota Makassar dari tahun 2009 sampai 2012.

Tabel 1.1

**Data Target Retribusi (Jasa) Pasar Kota Makassar
Tahun 2009-2012 (Rupiah)**

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perentase (%)
2009	327.179.500	294.802.500	90.1%
2010	336.752.500	270.257.500	80.3%
2011	366.642.200	218.110.500	59.5%
2012	409.990.000	342.996.500	83.68%

Sumber : PD. Pasar Makassar Raya, 2013

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2009-2012 realisasi retribusi (jasa) pasar di Kota Makassar tidak pernah memenuhi target dan realisasi. Dapat dilihat target Tahun 2009 yaitu 327.179.500 dengan realisasi hanya 294.802.500 dengan persentase 90.1% ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi (jasa) pasar belum maksimal karena di bawah persentase 95% tapi sudah mendekati maksimal, selanjutnya target tahun 2010 yaitu 336.752.500 sedangkan realisasinya 270.257.500 dengan persentase 80.3% ini juga menunjukkan bahwa pemungutan retribusi jasa pasar belum maksimal karena mengalami penurunan sebanyak 9.8%, target tahun 2011 yaitu 366.642.200 dan realisasinya 218.110.500 dengan persentase 59.5% dan ini juga menunjukkan bahwa pemungutan retribusi jasa masih belum maksimal dan terjadi penurunan sebanyak 20.8% dan pada target pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 409.990.000 dengan realisasi 342.996.500 dengan persentase 83,68% ini juga menunjukkan bahwa pemungutan retribusi jasa pasar masih belum maksimal tapi ini sudah menunjukkan

terjadi peningkatan meskipun pemungutannta belum maksimal karena masih dibawah 95%.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurharibnu Wibisono dan Saraswati Budi Utami (2011) yaitu menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota madiun pada tahun 2004-2008. Penelitian ini menunjukkan rasio kemandirian pemerintah kota Madiun sangat kurang namun trendnya relatif stabil dari 2004-2008, dengan rata-rata sebesar 7,57%, kinerja efektifitas pemerintah kota Madiun mengalami kenaikan terus menerus dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,07% pertahun, dan rasio kemandirian keuangan daerah kota Madiun rata-rata hanya 6,64% sedangkan derajat desentralisasi fiskal kota Madiun menunjukkan rata-rata hanya 6,5%, peningkatan PAD kota Madiun dari tahun 2004-2008 tidak berarti positif, karena hanya mampu menutupi belanja daerah hanya 6,88%.

Alasan peneliti dengan mengangkat judul penelitian Retribusi pasar dikarenakan pada Kota Makassar, retribusi pasar memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, mengingat bahwa Kota Makassar sendiri memiliki karakteristik masyarakat yang beragam. Sebagian masyarakatnya adalah masyarakat modern dengan pendapatan dan daya beli yang tinggi, namun mayoritas masyarakat justru masyarakat tradisional dengan sistem perekonomian yang sederhana, dimana pasar merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian sederhana tersebut (Tim KPPD, 2005:2). selain itu, dalam menggali penerimaan daerahnya khususnya Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang bersumber dari retribusi pasar tanpa mengabaikan efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah “Apakah pemungutan retribusi (jasa) pasar di Kota Makassar sudah efektif? “

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui efektifitas pemungutan retribusi (Jasa) pasar di Kota Makassar”

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengalaman di lapangan dalam menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam studi dengan kenyataan dalam lingkungan masyarakat yg sebenarnya

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam hal retribusi pasar

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharap dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kota Makassar khususnya bagi pembaca yang memerlukan informasi sesuai dengan masalah yang dibahas oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah tersendiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber Penerimaan Daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yg masuk ke kas daerah.

Sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 5 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam UU No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah :

1) Hasil pajak daerah

a) Pengertian pajak daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b) Pajak yang dipungut di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Hiburan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

2) Hasil retribusi daerah

a) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b) Unsur Retribusi Daerah

Ada empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi (Richard dan Wirawan, 2004:6)

- Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- Sifat pemungutannya dapat dipaksakan.
- Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum.
- Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

c) Fungsi Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut (soewondo, 1986:4):

- Fungsi Penerimaan

Pungutan retribusi dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat.

- Fungsi Peraturan

Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

- Fungsi Manfaat

Retribusi hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan Pendapatan Asli Daerah serta mendorong maju pertumbuhan ekonomi.

d) Jenis-Jenis retribusi daerah

Adapun jenis-jenis retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah menjadi (Mardiasmo, 2003 : 101-103) :

- Retribusi jasa umum

- Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Penguji Kapal Perikanan

- Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan
- Retribusi Tempat Pelelangan
- Retribusi Terminal

- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan
- Retribusi Penyedotan Kakus
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
- Retribusi Penyebrangan Di Atas Air
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Penjualan Produksi Daerah
- Retribusi Perizinan Tertentu
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - Retribusi Izin Gangguan
 - Retribusi Izin Trayek

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perusahaan daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar) dan industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jenis pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain:

- a) Bagian laba perusahaan milik daerah.
- b) Bagian laba lembaga bank

- c) Bagian laba lembaga non bank
- d) Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan ini meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/ jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

d. Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah.

Lain-lain pemerintahan daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Pendapatan hibah
- 2) Pendapatan dana darurat

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak, dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah terdiri sendiri dari sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2013), pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara
- 2) Berdasarkan undang-undang
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luar.

c. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2013), ada 2 fungsi pajak, yaitu :

- 1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi Megatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sisoal dan ekonomi.

3. Retribusi Pasar

a. Definisi Retribusi (Jasa) Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2001 menjelaskan bahwa Pasar adalah suatu area arau lokasi tertentu yang disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk kios, los, dan bentuk bangunan lainnya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar, yang dimaksud dengan pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, berupa bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah yang lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa.

Menurut peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 yang dimaksud dengan Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa peralatan, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta, fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu kenyamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Retribusi pasar yang selanjutnya disingkat dengan retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atau pemberian fasilitas tempat dasaran pasar.

b. Jenis dan Kriteria Pasar

Menurut Peraturan Daerah kota Makassar tentang Jenis dan Kriteria Pasar tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2009 Pasal 4 dan 5 yaitu :

1) Pasal 4 (Pasar Tradisional)

Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk yaitu:

- a) Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari;
- b) Pasar Kelurahan adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan kelurahan atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan kelurahan atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok;
- c) Pasar tradisional kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar kelurahan atau kelurahan;

- d) Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar kramik, pasar burung, dan sejenisnya;
- e) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.

2) Pasal 5 (Pasar Modern)

- a) Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko modern, seperti: minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya, yang dikelola secara modern;
- b) Usaha toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
- Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi);
 - Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 400 m² sampai dengan 5000 m² (Lima Ribu Meter Persegi);
 - Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribu Meter Persegi);

- Department Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400m² (Empat Ratus Meter Persegi);
- Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribuh Meter Persegi).

c) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern dan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut:

- Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
- Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

c. Ciri-ciri Retribusi Pasar

Dari pendapat diatas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah:

- 1) Retribusi dipungut oleh negara Retribusi merupakan pungutan sah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomisRetribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) atas pelayanan yang diberikan

oleh daerah kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan demikian, terdapat suatu paksaan bagi pengguna jasa layanan untuk membayar retribusi sebagai bentuk penggantian yang setimpal atas pemberian jasa layanan oleh pemerintah daerah.

- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan Hal ini berarti bahwa pungutan retribusi didasarkan pada suatu pelayanan yang nyata-nyata dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa layanan tersebut. d. Retribusi dikenakan pada setiap orang / badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara. Retribusi dikenakan terhadap siapa saja yang telah mengenyam jasa dari pemerintah daerah. Dengan demikian, jika ingin memperoleh jasa atau memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah barulah pemakai membayarnya, selain itu, pungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali.

4. Landasan Hukum

- a. Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.
- b. Peraturan Daerah kota Makassar Nomor : 9 Tahun 2000 tentang ketentuan-ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD. Pasar Makassar Raya.
- c. Peraturan Daerah Nomor ; 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 4 Tahun 1999

tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Makassar Raya Kotamadya Tingkat II Ujung pandang.

- d. Peraturan Daerah kota Makassar Nomor : 12 Tahun 2004 tentang pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar
- e. Peraturan Walikota Makassar Nomor :12 Tahun 2006 tanggal 27 maret 2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
- f. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 8175 tahun 1999 tanggal 11 Desember 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
- g. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 13/S.Kep/511.2/1001 tanggal 7 Januari 2001 tentang Pemisahan Sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan daerah Pasar makassar Raya.
- h. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 452/S.Kep/511.2/2001 tanggal 8 mei 2001 tentang Penunjukan PD. Pasar makassar Raya sebagai pengelola Pasar Milik Pemerintah Kota Makassar.
- i. Keputusan Walikota makassar Nomor ; 741/S.Kep/030/2001 tanggal 3 Desember 2003 tentang Pemisahan Sebagian barang Milik Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan Daerah Pasar makassar raya kota Makassar.
- j. Keputusan Walikota Makassar Nomor ; 15/S.Kep/511.2/2005 tentang Pengesahan tarif Sewa dan Jasa Pelayanan Daerah Pasar makassar Raya Kota Makassar.

5. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar khususnya pada kota makassar terhadap pendapatan asli daerah sangat fluktuatif, cenderung meningkat. dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikalikan dengan 100%

6. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Ravianto (2014:11) adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

b. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2004:135) atau mengukur hasil pungut pajak terhadap target yang ditetapkan (Halim, 2004:93)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian efektifitas PAD dan efektifitas pajak, maka yang dimaksud dengan efektifitas pemungutan retribusi pasar yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah melalui KPPD dalam merealisasikan retribusi pasar yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan atau mengukur hasil penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan. Semakin besar penerimaan retribusi pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditugas ditentukan, maka semakin efektif proses kerja kantor pengelolaan pasar daerah

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanRetribusiPasar}}{\text{TargetPenerimaanRetribusiPasar}} \times 100\%$$

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 %, sehingga semakin tinggi rasio efektifitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik (Halim, 2004:135)

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris adalah penelitian yang dilakukan terdahulu, dalam hal ini penelitian mengenai efektifitas pemungutan retribusi pasar Terhadap pendapatan asli daerah. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu tentang efektifitas pemungutan retribusi yang pernah dilakukan:

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode penelitian	Hasil
1	Amri Siregar (2009) (jurnal)	Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara	- Pajak - Retribusi - Pendapatan Daerah (PAD) - Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Kuantitatif : - Regresi Linier Berganda	- penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2003 sampai 2007 adalah efektif - kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami penurunan - PDRB dan PMDN berpengaruh positif terhadap PAD
2	Syifa Shafariyah Rahmani (2009) (jurnal)	Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kuantitatif : - Regresi Linier Berganda	- Tingkat efektifitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap PAD - Tingkat efektifitas pemungutan retribusi tidak berpengaruh terhadap PAD - tingkat efektifitas pemungutan pajak dan retribusi secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD
3	Dina Anggraeni (2010) (jurnal)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu)	Variabel Dependen: - PAD Variabel Independen: - Pajak Daerah - Retribusi Daerah	Kuantitatif : - Regresi Linier Berganda	- Pajak Daerah dan Retribusi daerah memiliki pengaruh dan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	Septiawan Dwi Kurniawan (2010) (jurnal)	Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kuantitatif : - Regresi Linier Berganda	- Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah - pajak daerah mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada retribusi

5	H. Mat Juri (2012) (jurnal)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kuantitatif : - Deskriptif Kuantitatif	- Kontribusi tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010 sangat fluktuatif
---	-----------------------------	--	--	---	--

Tabel 2.1 : Tinjauan Empiris

C. Kerangka Konsep



Gambar 2.1 : Kerangka Konsep (alur pemungutan retribusi pasar)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan secara singkat bahwa beberapa cara pemungutan retribusi pasar. Pertama dilakukan oleh petugas retribusi kepada kepala pasar, setelah itu diberikan kepada pembantu bendaharawan khusus penerima sebelum diberikan kepada bendahara khusus yang dimana setelah itu di setorkan kembali kepada bank pembangunan daerah, Jadi berdasarkan dari alur pemungutan

retribusi pasar ini dapat diketahui bahwa retribusi pasar berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan analisis efektivitas untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan daerah dengan membandingkan antara realisasi dan targetnya. Peneliti juga menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh penerimaan daerah terhadap PAD.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

“Efektifitas pemungutan retribusi pasar di kota makassar pada tahun 2017 meningkat”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sumber Data

Metode kuantitatif adalah metode yang didalamnya berisi komponen-komponen metode kuantitatif pada garis besarnya memuat jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. (Kasiram (2008: 149) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang meliputi data pada tahun 2017

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Pengelolaan Pasar Daerah kota Makassar Raya Kota Makassar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), alasan penulis mengambil judul ini dikarenakan potensi retribusi pasar terhadap PAD di Kota Makassar sangatlah besar kedepannya dan berdasarkan judul penelitian yang di angkat oleh penulis tentang efektivitas pemungutan retribusi pasar

terhadap Pendapatan Asli maka, diambilnya tempat penelitian di KPPD dan BPKKD.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 18 Mei 2019 – 18 Juli 2019

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) yaitu :

- a. Retribusi (Jasa)Pasar (dependen) adalah pungutan suatu daerah oleh pemerintah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Pendapatan Asli Daerah (independen) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. *Interview* yaitu melakukan wawancara dan perbincangan secara langsung dengan pimpinan dan sejumlah staf yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. *Dokumentasi* adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau dengan menggunakan alat perekam suara atau dicatat pada buku catatan
3. Studi pustaka dari berbagai literature, majalah, koran, jurnal, dan lain-lain

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Untuk mengetahui efektifitas pemungutan retribusi pasar Kota Makassar dengan rumus :

$$efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Pasar}{target\ Penerimaan\ Retribusi\ Pasar} \times 100\%$$

Adapun cara menyajikan hasil perhitungan ke dalam tabel Efektivitas Pemungutan Retribusi (Jasa) Pasar di Kota Makassar seperti tabel berikut ini :

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Retribusi Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Efektivitas (%)
2017			
Rata-rata			

Tabel 3.1 : Efektivitas Pemungutan retribusi Pasar di Kota Makassar Tahun 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

1. Keadaan geografis

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat $119^{\circ}, 18', 27', 97''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}, 8', 6', 19''$ Lintang Selatan. Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di
Kota Makassar

Kecamatan	Luas Wilayah	
	Km ²	%
Mariso	1,82	1,04
Mamajang	2,25	1,28
Tamalate	20,21	11,50
Rappocini	9,23	5,25
Makassar	2,52	1,43
Ujung Pandang	2,63	1,50
Wajo	1,99	1,13
Bontoala	2,10	1,19
Ujung Tanah	5,94	3,38
Tallo	5,83	3,32
Panakkukang	17,05	9,70
Manggala	24,14	13,73
Biringkanaya	48,22	27,43
Tamalanrea	31,84	18,11
Kota Makassar	175,77	100,00

Sumber: Kota Makassar Dalam Angka 2017

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan dan 143 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Biringkanaya dengan luas wilayah sebesar 48,22 km² atau 27,43 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Mariso dengan luas 1,82 km² atau 1,04 persen.

2. Kependudukan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, jumlah penduduk Kota Makassar pada pertengahan 2017

tercatat sebesar 1.469.601 jiwa yang terdiri dari 727.314 laki-laki dan 742.287 perempuan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kota Makassar di Rinci Berdasarkan Kecamatan

KECAMATAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mariso	29.856	29.436	59.292
Mamajang	29.884	31.123	61.007
Tamalate	96.516	97.977	194.493
Rappocini	79.660	84.903	164.563
Makassar	42.048	42.710	84.758
Ujung Pandang	13.453	15.044	28.497
Wajo	15.164	15.769	30.933
Bontoala	27.579	28.957	56.536
Ujung Tanah	24.794	24.429	49.223
Tallo	69.739	69.428	139.167
Panakkukang	73.114	74.669	147.783
Manggala	69.541	69.118	138.659
Biringkanaya	100.978	101.542	202.520
Tamalanrea	54.988	57.182	112.170
Makassar	727.314	742.287	1.469.601

Sumber: Kota Makassar Dalam Angka 2017

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk terbesar yang dirinci menurut Kecamatan pada tahun 2017 terdapat di Kecamatan Biringkanaya sejumlah 100.978 jiwa laki-laki dan 101.542 jiwa perempuan dengan jumlah penduduk sebanyak 202.520 sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Ujung Pandang dengan 13.453 jiwa laki-laki dan 15.044 jiwa perempuan dengan jumlah penduduk sebanyak 28.497 jiwa.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Dirinci Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Makassar

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
0-4	70 626	67 503	138 129
5-9	63 647	61 087	124 734
10-14	59 704	56 957	116 661
15-19	79 016	81 117	160 133
20-24	97 986	95 241	193 227
25-29	69 180	67 707	136 887
30-34	55 959	58 771	114 730
35-39	48 957	52 927	101 884
40-44	47 053	51 121	98 174
45-49	41 816	43 511	85 327
50-54	31 661	31 932	63 593
55-59	23 543	25 364	48 907
60-64	15 956	17 597	33 553
65+	22 210	31 452	53 662
Kota Makassar	727 314	742 287	1 469 601

Sumber : Kota Makassar Dalam Kota 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang belum produktif yaitu usia 0 – 9 tahun berjumlah 262.863 jiwa. Dan penduduk yang berumur 65 tahun ke atas berjumlah 53.662 jiwa. Sedangkan penduduk yang berada pada usia produktif atau yang berumur 15 – 64 tahun berjumlah 1.153.082 jiwa.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemampuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

- a. Pada jenjang SD Kota Makassar pada tahun 2017 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kota Makassar

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
S MARISO	19	5.039	233	21,63
MAMAJANG	25	8.109	358	22,65
TAMALATE	44	13.812	597	23,14
RAPPOCINI	50	12.686	670	18,93
MAKASSAR	39	10.773	487	22,12
UJUNG PANDANG	33	9.135	505	18,09
WAJO	13	3.266	171	19,10
U BONTOALA	24	5.552	267	20,79
UJUNG TANAH	21	5.823	231	25,21
KEP. SANGKARRANG
TALLO	46	14.856	586	25,35
PANAKKUKANG	51	14.301	781	18,31
MANGGALA	39	13.598	635	21,41
BIRINGKANAYA	51	18.878	841	22,45
TAMALANREA	35	10.911	523	20,86
KOTA MAKASSAR	490	146.738	6.885	21,31

Sumber : Kota Makassar Dalam Kota 2017

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dikatakan bahwa jumlah sekolah pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Makassar yang di rinci

berdasarkan Kecamatan adalah sebanyak 490 sekolah, 146.738 murid dan 6.885 guru, dengan jumlah Sekolah Dasar (SD) terbanyak di kecamatan biringkanaya dengan jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 51 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 18.878 dan guru sebanyak 841 orang. Sedangkan jumlah Sekolah Dasar (SD) yang paling sedikit berada di kecamatan wajo dengan jumlah sebanyak 13 sekolah, 3266 murid dan 171 guru.

- b. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Kota Makassar pada tahun 2017 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kota Makassar

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
MARISO	6	2.516	121	20,79
MAMAJANG	10	4.958	222	22,33
TAMALATE	15	6.549	368	17,80
RAPPOCINI	20	5.525	371	14,89
MAKASSAR	18	2.654	179	14,83
UJUNG PANDANG	19	6.076	370	16,42
WAJO	6	1.519	72	21,10
BONTOALA	13	2.253	128	17,60
UJUNG TANAH	11	3.143	132	23,81
KEP. SANGKARRANG
TALLO	15	4.478	243	19,54
PANAKKUKANG	18	4.213	212	19,87
MANGGALA	16	7.026	357	19,68
BIRINGKANAYA	24	9.817	551	17,82
TAMALANREA	13	4.479	254	17,63
KOTA MAKASSAR	204	65.476	3.580	18,21

Sumber : Kota Makassar Dalam Kota 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat di katakan bahwa jumlah sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar yang di rinci berdasarkan Kecamatan adalah sebanyak 204 sekolah, 65.476 murid dan 3.580 guru. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas Kota Makassar pada tahun 2017 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Akhir Menurut Kecamatan di Kota Makassar

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
MARISO	5	2.184	133	16,42
MAMAJANG	11	4.028	237	17,00
TAMALATE	9	4.006	226	17,73
RAPPOCINI	16	2.312	174	13,29
MAKASSAR	10	1.013	102	9,93
UJUNG PANDANG	11	3.854	240	16,06
WAJO	4	734	47	15,62
BONTOALA	7	1.800	117	15,38
UJUNG TANAH	5	1.772	102	17,37
TALLO	4	1.353	82	16,50
KEP. SANGKARRANG
PANAKKUKANG	12	2.818	178	15,83
MANGGALA	13	4.952	308	16,08
BIRINGKANAYA	10	4.333	271	15,99
TAMALANREA	9	3.307	199	16,62
KOTA MAKASSAR	126	38.466	2.416	15,92

Sumber : Makassar Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat di katakan bahwa jumlah sekolah pada Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar yang di rinci berdasarkan Kecamatan adalah sebanyak 126 sekolah, 38.466 murid dan 2.416 guru.

B. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar

1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi (Jasa) Pasar Kota Makassar

Berikut ini adalah perincian penerimaan target dan realisasi retribusi (jasa) pasar Kota Makassar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 4.7
Perincian penerimaan Target dan Realisasi Retribusi (jasa) Pasar Kota Makassar dari Tahun 2014-2017

Tahun anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	10.034.204.440,-	9.925.351.799,69,-
2015	12.349.547.000,-	13.816.031.137,09,-
2016	16.257.095.550,-	15.467.688.472,09,-
2017	19.366.510.000,-	14.903.617.489,10,-

Sumber : PD. Pasar Makassar Raya, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2014-2017 realisasi retribusi pasar di Kota Makassar dapat dikatakan berfluktuatif. Dapat dilihat Target Tahun 2014 yaitu 10.034.204.440 dengan realisasi hanya 9.925.351.799,69 ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi jasa pasar belum maksimal karena dibawah target walaupun mendakati maksimal, selanjutnya target tahun 2015 yaitu 12.349.547.000 sedangkan realisasinya 13.816.031.137,09 juga menunjukkan bahwa pemungutan retribusi jasa pasar mengalami kenaikan dengan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 target yang diberikan oleh Pemerintah kota Makassar dapat terpenuhi. target tahun 2016 yaitu 16.257.095.550 dan realisasinya 15.467.688.472,09 dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan

target yang dibeikan oleh Pemerintah kota Makassar belum terpenuhi, dan pada target pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 19.366.510.000 dengan realisasi 14.903.617.489,10 dikatakan mengalami penurunan dari target dan realisasi yang di tentukan oleh Pemerintah Kota Makassar pada tahun sebelumnya

2. Penentuan Target Retribusi (jasa) Pasar Kota Makassar

Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar. Yang di maksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran.

PD Pasar Makassar Raya menyusun target penerimaan jasa Pasar dengan cara turun langsung ke pasar melakukan uji potensi-potensi yang ada di pasar setiap tahunnya. Maksudnya disini yaitu dengan mendata ulang setiap tahun potensi yang ada di yaitu dengan berapa jumlah pedagang yang masih aktif dengan yang sudah tidak aktif karena setiap tahunnya jumlah pedagang yang masih aktif atau sudah tidak aktif selalu berubah. Dengan melakukan pendataan ulang terhadap potensi dipasar setiap tahunnya diharapkan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana di dalamnya telah di tetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam anggaran berikutnya.

3. Proses Pemungutan Retribusi/Jasa Pasar Kota Makassar

- a. Setiap hari, petugas memungut retribusi (jasa) pasar dari semua pedagang yang mejadi Wajib Retribusi dengan membawa kartu retribusi.
- b. Berdasarkan Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRD), petugas menagih dan memungut retribusi pasar kepada pedagang sebagai Wajib Retribusi sesuai dengan besarnya retribusi pasar yang terutang.
- c. Setelah Wajib Retribusi membayar retribusi pasar, maka petugas akan memberi karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pasar.
- d. Petugas menghitung penerimaan retribusi pasar dari karcis yang telah habis dan berdasarkan kartu retribusi. Kemudian dicatat dalam buku kendali.
- e. Dalam satu hari seluruh hasil pemungutan retribusi pasar dikumpulkan kepada bendahara pasar. Dari bendahara pasar, hasil pemungutan retribusi pasar tersebut disetorkan ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).

4. Skema (Alur) Pemungutan Retribusi (Jasa) Pasar

PASAR KOLEKTOR BENDAHARAWAN KASDA (BPD)

Gambar 4.1 Skema (Alur) pemungutan Retribusi Pasar

Berdasarkan gambar di atas, penjelasan dari skema pemungutan retribusi (jasa) pasar. Pertama dimulai dari proses penagihan yang dilakukan oleh pihak PD. Pasar Makassar Raya kepada pihak pasar yang dilakukan oleh kolektor, setelah disetorkan kepada bendaharawan, bendaharawan memiliki tugas yaitu mensortir dana tersebut lalu di setor kepada kasda dalam hal ini bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yaitu Bank SULSELBAR (BPD) dan kegiatan pemungutan tersebut dilakukan dalam waktu 1x24 jam.

5. Upaya Peningkatan PAD di PD Pasar Kota Makassar

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001, adalah : “Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa salah satu pelataran dan los yang dikelola untuk pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang” (Perda No.3 Tahun 2001) retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan .

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana merupakan pelataran, los yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum,

pemyediaan air, telepon, kebersihan, dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaan pungutan terhadap jasa pasar sebagai sumber PAD Kota Makassar masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat sebagai wajib retribusi. Untuk meningkatkan pemungutan jasa pasar Kota Makassar maka perencanaan harus efektif dan pelaksanaan pemungutannya harus optimal, karena dengan perencanaan yang efektif dan pelaksanaan pemungutan yang optimal maka target penerimaan jasa pasar dapat terealisasi.

Jika pemungutan jasa pasar berjalan optimal maka penerimaan jasa pasar terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Adapun beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PD. Pasar yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) Pasar

1. Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada di Pasar.
2. Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat).
3. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing dalam membayar tagihan.
4. Penyesuain tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua pedagang, baik yang menempati ruko, front toko, kios, lods

dan pelataran.

5. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana pasar.

C. Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kota Makassar

Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan. Semakin besar penerimaan retribusi jasa pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja Kantor Pengelolaan Pasar Daerah.

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi (jasa) pasar di Kota Makassar pada tahun 2014-2017 digunakan rumus berikut:

Menurut Halim (2004:135)

$$efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Pasar}{Target\ Penerimaan\ Retribusi\ Pasar} \times 100\%$$

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi (jasa) pasar di Kota Makassar yang semakin baik (Halim, 2004:135)

Perhitungan efektivitas pemungutan retribusi (jasa) pasar

pada tahun 2014-2017 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8
Pemungutan Retribusi (jasa) Pasar di Kota Makassar
Tahun 2014-2017

Tahun anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	10.034.204.440,-	9.925.351.799,69,-
2015	12.349.547.000,-	13.816.031.137,09,-
2016	16.257.095.550,-	15.467.688.472,09,-
2017	19.366.510.000,-	14.903.617.489,10,-

Sumber : PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Berdasarkan tabel diatas untuk mengetahui ke efektifitasan target yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan realisasi yang telah dicapai oleh PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas pemungutan Retribusi (jasa) Pasar tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{9.925.351.799,69}{10.034.204.440} \times 100\% \\ &= 98,91\% \end{aligned}$$

- b. Efektivitas Pemungutan Retribusi (jasa) Pasar tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{13.816.031.137,09}{12.349.547.000} \times 100\% \\ &= 111,87\% \end{aligned}$$

- c. Efektivitas Pemungutan Retribusi (jasa) Pasar tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{15.467.688.472,09}{16.257.095.550} \times 100\% \\ &= 95,14\% \end{aligned}$$

- d. Efektivitas Pemungutan Retribusi (jasa) Pasar tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{efektivitas} &= \frac{14.903.617.489,10}{19.366.510.000} \times 100\% \\ &= 76,95\% \end{aligned}$$

Secara jelas berdasarkan data diatas, dapat dikatakan bahwa efektivitas pemungutan retribusi (jasa) pasar ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 4.9
Efektivitas Pemungutan Retribusi (jasa) Pasar
Di Kota Makassar Tahun 2014-2017

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Retribusi (jasa) Pasar (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi (jasa) Pasar (Rp)	Efektivitas (%)
2014	10.034.204.440,-	9.925.351.799,69,-	98,91
2015	12.349.547.000,-	13.816.031.137,09,-	111,87
2016	16.257.095.550,-	15.467.688.472,09,-	95,14
2017	19.366.510.000,-	14.903.617.489,10,-	76,95
Rata-Rata			95,71

Sumber : PD. Pasar Makassar Raya 2019

Efektivitas pemungutan retribusi (jasa) pasar masih berfluktuatif dapat dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan retribusi jasa pasar atau pada kolom efektivitas, hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pihak pedagang untuk melakukan kewajibannya dalam membayar retribusi.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2014 pemungutan retribusi (jasa) pasar mencapai 98,91%. Pada tahun ini penerimaan retribusi (jasa) pasar ditargetkan sebesar Rp. 10.034.204.440,- sementara yang terealisasi sebesar Rp. 9.925.351.799,69,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi (jasa) pasar sebesar Rp. 108.852.640,31,- atau 1,09% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.
- b. Pada tahun 2015 efektivitasnya mencapai 111,87%. Pada tahun ini penerimaan retribusi (jasa) pasar ditargetkan sebesar Rp.

12.349.547.000,- sementara yang teralisasi sebesar Rp. 13.816.031.137,09,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat kelebihan penerimaan retribusi (jasa) pasar sebesar Rp. 1.466.484.137,09,- atau 11,87% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya sudah efektif karena melebihi 100%.

- c. Pada tahun 2016 efektivitasnya mencapai 95,14% pada tahun ini penerimaan retribusi (jasa) pasar ditargetkan sebesar Rp. 16.257.095.550,- sementara yang terealisasi sebesar Rp. 15.467.688.472,09,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi sebesar Rp. 789.407.077,91,- atau 4,86% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.
- d. Pada tahun 2017 efektivitasnya mencapai 76,95% pada tahun ini penerimaan retribusi (jasa) pasar ditargetkan sebesar Rp. 19.366.510.000,- sementara yang terealisasi sebesar Rp. 14.903.617.489,10,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi sebesar Rp. 4.462.892.510,90,- atau 23,05% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

“ Efektivitas pemungutan retribusi (jasa) pasar di kota Makassar pada tahun 2014 sebesar 98,91%, tahun 2015 sebesar 111,87%, tahun 2016 sebesar 95,14%, tahun 2017 sebesar 76,95% dengan rata-rata efektivitas sebesar 95,71% pertahunnya. Dengan demikian pemungutan retribusi (jasa) pasar di Kota Makassar selama tahun 2014 sampai dengan 2017 tidak efektif, karena rata-rata efektifnya dibawah 100%”. Berdasarkan penjelasan di atas penyebab dari naik atau turunnya realisasi penerimaan pemungutan retribusi (Jasa) Pasar yaitu adalah dikarenakan penetapan harga retribusi dan target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat masih bersifat fluatif, selain itu kurangnya juga kesadaran dari pihak pedagang untuk melakukan wajib retribusi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya Kota Makassar, maka penulis memberikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi Pemerintah Daerah kota Makassar untu meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) Pasar. Saran yang diberikan penulis antara lain:

1. bagi pemerintah daerah, agar menetapkan standar efektivitas yang jelas dan pasti menurut Peraturan Daerah yang sudah disahkan sebelumnya, sehingga Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat menilai kinerja daerahnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi (jasa) pasar untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya.
2. Melakukan penghematan biaya pemungutan retribusi (jasa) pasar serta mempertimbangkan program yang akan dilaksanakan sehingga memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
3. Pemerintah daerah harus menetapkan target secara realistis supaya tidak menetapkannya terlalu tinggi, sekaligus memperhitungkan tingkat resiko tidak terpungutnya retribusi (jasa) pasar.
4. Pemberian sanksi yang tegas kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi (jasa) pasar secara penuh
5. Menambah SDM di PD. Pasar untuk membantu dalam melaksanakan pemungutan yang tertib sehingga dapat turut serta meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) pasar
6. Menciptakan pasar yang bersih, tertib dan nyaman sehingga dapat mempengaruhi minat pedagang untuk berjualan di pasar sekaligus mempengaruhi minat pengunjung untuk berbelanja di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni.D.2010.Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu)
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2014. *Makassar Dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik Kota Makassar: Makassar.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2015. *Makassar Dalam Angka 2015*. Badan Pusat Statistik Kota Makassar: Makassar.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2016. *Makassar Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kota Makassar: Makassar.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2017. *Makassar Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kota Makassar: Makassar.
- Julitawati, Darwanis, & Jalaluddin,. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No. 1, Diakses 17 Januari 2019.
- Juri.M.2012.Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.
- Mardiasmo,. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Lembaga Perpustakaan dan Penertiban Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Daerah No. 3 tahun 2001 Tentang Definisi Pasar dan Retribusi Pasar
- Peraturan Daerah No. 4 tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2004 Tentanf Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2009 tentang Pasar Tradisional dan Modern
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional, dan penataan pasar modern.
- Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Pelayanan Pasar

Repositori UIN Alauddin tentang Analisis Kontribusi dan Retribusi Pasar Terhadap PAD

Sadjino.2006.Analisis Kontribusi dan Retribusi Pasar Terhadap PAD

Septiawan.D.2010.Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.

Shafariyah.S.2009.Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta:Pemda DKI

Soebaechi.I.2017.Perda Pajak dan Retribusi Daerah Surabaya:Grafika Sinar.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23. Tahun 2014. tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28. Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33. Tahun 2004. tentang tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wahyu.V.2007. Analisis Efisiensi dan efektivitas serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.





PD. PASAR
MAKASSAR RAYA

BUKTI SETORAN

Unit Pasar

Hari Tgl. 20

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah
1.	Jasa Jualan Harian Pasar	Rp.
2.	Jasa Penggilingan Daging	Rp.
3.	J. Peng. Kelapa, Tepung, Rempah ul	Rp.
4.	Jasa Pencabutan Bulu Ayam	Rp.
5.	Jasa Mobil Box	Rp.
6.	Jasa Parkir	Rp.
7.	Jasa Bongkaran	Rp.
8.	Jasa MCK	Rp.
9.	Jasa Kebersihan	Rp.
10.	Jasa Keamanan	Rp.
11.	Jasa Tagihan Listrik	Rp.
12.	Jasa Produksi 20	Rp.
13.	Jasa Produksi 20	Rp.
14.	Tunggakan Jasa Produksi s/d 20	Rp.
15.	Kartu	Rp.
16.	BBN	Rp.
17.	Rekomendasi	Rp.
18.	Jasa Reklame	Rp.
19.	Jasa Penerimaan Lain-lain	Rp.
20.		Rp.
21.		Rp.
	JUMLAH	Rp.
<i>Terbilang:</i>		

Bend. Penerima,

Penyetor,

.....

.....



SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/436/PD. PSR/VII/2019

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor: 070/1683-II/BKBP/VI/2019 tertanggal 24 Mei 2019 perihal Izin Penelitian yang ditujukan kepada Direksi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **THAMRIN MENSA ST.MM**
Jabatan : Direktur Umum
PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **NUR ANHISA UMAR**
Nim/Jurusan : 10571 0218615/ IESP
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **" ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI (JASA) PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017) "**

Diberikan izin untuk meneliti dalam lingkup PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, mulai tanggal 24 Mei s/d 13 Juli 2019.

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 02 Juli 2019

Direksi
PD. Pasar Makassar Raya

THAMRIN MENSA, ST.,MM
Direktur Umum

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Makassar Raya di Makassar.
2. Direktur Utama PD. Pasar Makassar Raya di Makassar
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar.
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
5. Mahasiswa yang bersangkutan.
6. Arsip.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail: lp3mmuhm@plpva.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1442/05/C.4-VIII/III/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

09 Ramadhan 1440 H
14 May 2019 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 338/C.4-II/V/40/2019, tanggal 14 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NUR ANNISA UMAR
No. Stambuk : 10571 0218615
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : IESP
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Penterintahan Kota Makassar Tahun 2017)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Mei 2019 s/d 18 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumulahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,


Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 24 Mei 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 1483 -II/BKBP/V/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. DIR. PD. PASAR MAKASSAR RAYA
KOTA MAKASSAR

DI -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 16605/S.01/PTSP/2019 Tanggal 23 Mei 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : NUR ANNISA UMAR
NIM / Jurusan : 10571 0218615 / IESP
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Sit Aiauddin No. 259, Makassar
Judul : "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017)"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Sripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **24 Mei s/d 18 Juli 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian** ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperiunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Dr. ANDI SYAHRUM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19660517 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

BIOGRAFI PENULIS



Nur Annisa Umar, panggilan Nunu lahir di Makassar pada tanggal 15 Oktober 1997 dari pasangan suami istri Bapak Umar Baco, SE dan Ibu Rahmatiah Sayuti., SE. MH. Peneliti adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Toddopuli V stp 7 No. 42 Blok 31 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Mangkura IV lulus tahun 2009, SMP Negeri 3 Makassar lulus tahun 2012, SMA LPP YW UMI Makassar lulus tahun 2015.

